

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**SITI YAMINI  
07011281419206**

**Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Indralaya, Ogan Ilir**

**Mei, 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM  
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara

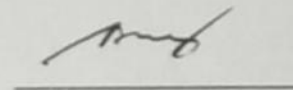
Oleh :

**SITI YAMINI**  
07011281419206

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Sofvan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Mei 2018.

Indralaya, 15 Mei 2018

Ketua:

1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Anggota:

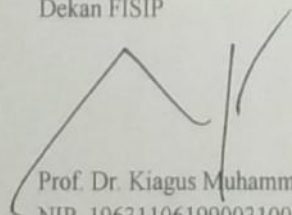
1. Sofyan Effendi S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

2. Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002

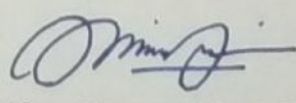
3. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Mengetahui:

Dekan FISIP

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Change will not come if we wait for some other person or some other time.  
We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek”*  
**(BARACK OBAMA)**

Dengan rahmat Allah Subhanahuwata’ala,  
skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak  
Badrun dan Ibu Supirah
- Keempat saudaraku Muslimah,  
Mukaromah, Hariyanti, dan Kastini
- Teman seperjuangan AN FISIP 2014
- Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang”** tepat pada waktunya.

Selama masa penulisan, penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku Badrun dan Supirah beserta saudaraku Muslimah, Mukaromah, Hariyanti, dan Kastini yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil serta pengorbanan yang tiada batas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama melaksanakan studi kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi kuliah.
9. Seluruh Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, terkhusus untuk Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, serta Kasubag Keuangan yang telah memberikan arahan serta memudahkan penulis dalam pengambilan data.
10. Sahabatku Ajeng Tri Surya, Anita Ramadhani, Mini Ekasari, Rini, dan Zela Nesti Dewi yang selalu memberikan saran dan dukungan kepada penulis.

11. Tinosumiceraku, Kristia Ayu Wulandari, Novi Sriyanti, Suci Melati Sukma, Cece Septiani Ropi, dan Masayu Abrah yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna semakin baiknya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Mei 2018

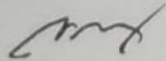
Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins, yang diukur dengan aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang belum berjalan dengan akuntabel, untuk aspek efisiensi terdapat anggaran belanja yang tidak terealisasi dan aspek pelaporan keuangan belum menggunakan media untuk pengungkapan laporan keuangan dan tidak transparan dalam memberikan informasi hasil audit laporan keuangan. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang lebih memperhatikan komponen anggaran belanja dan menambah media untuk pengungkapan laporan keuangan.

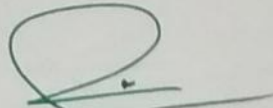
**Kata kunci :** Akuntabilitas, Anggaran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Pembimbing I**



Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001

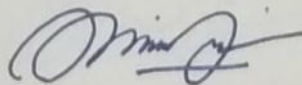
**Pembimbing II**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Mei 2018

Ketua Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



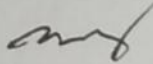
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002

## **ABSTRACT**

*This study entitled "Accountability of the Office Administration Service Program Budget Usage At The Office of Investment and One Door Integrated Service Palembang". This study aims to find out how the accountability of budget usage of office administration services program at the Office of Investment and Integrated Service One Door Palembang. The type of this research is descriptive qualitative. Data collection techniques we're conducted through observation, documentation and interviews. This study uses financial accountability theory by Hopwood and Tomkins, as measured by economic aspects, efficiency, effectiveness, and financial reporting. Based on four aspect of accountability of budget usage of office administration service program at One Stop Office of City Government of Palembang not run accountably yet, for efficiency aspect there is unrealized expenditure budget and financial reporting aspect have not use media for financial statement disclosure and not transparency in providing information on financial statement audit results. We recommend that the Office of Investment and Integrated Service One Door of Palembang to take more attention to the budget component and use any other media for the disclosure of financial statements.*

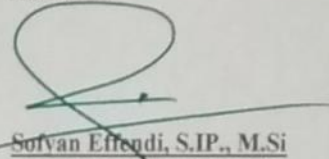
**Keywords:** *Accountability, Budget, Office Administration Service Program*

*Advisor I*



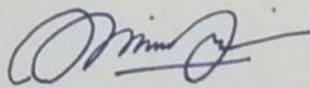
Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001

*Advisor II*



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

*Indralaya, Mei 2018*  
*Chairman of the Department of Public Administration*  
*Faculty of Social and Political Sciences*  
*Sriwijaya University*



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PEESETUJUAN TIM PENGUJI .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis.....	10
2. Manfaat Teoritis .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	12
1. Keuangan Daerah .....	12
2. Anggaran .....	15
3. Akuntabilitas Keuangan .....	20
B. Teori Akuntabilitas Keuangan Yang Digunakan .....	25
C. Kerangka Teori.....	26
1. Ekonomis.....	26
2. Efisiensi .....	27
3. Efektivitas.....	27
4. Pelaporan Keuangan.....	28
D. Penelitian Terdahulu.....	29
E. Kerangka Pemikiran .....	31

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Definisi Konsep .....	33
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Informan Penelitian .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data .....	37

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DPM-PTSP Kota Palembang.....	39
1. Sejarah Singkat DPM-PTSP Kota Palembang .....	39

2.	Visi dan Misi DPM-PTSP Kota Palembang.....	40
a.	Visi .....	40
b.	Misi.....	40
3.	Tugas Pokok dan Fungsi DPM-PTSP Kota Palembang.....	41
4.	Indikator Kinerja Utama.....	41
5.	Arah Kebijakan.....	43
6.	Penetapan Kinerja.....	45
7.	Sumber Daya Manusia (SDM) DPM-PTSP Kota Palembang .....	46
a.	Stuktur Organisasi .....	46
b.	Pembagian Tugas dan Fungsi.....	48
B.	Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi .....	55
	Perkantoran Di DPM-PTSP Kota Palembang	
1.	Sumberdaya Input Diperoleh Diperoleh Dengan Harga .....	56
	Lebih Rendah ( <i>Spending Less</i> )	
a.	Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Tender, Pengontrakan.....	61
	dan Sewa Beli	
b.	Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Ekonomis .....	64
2.	Menghasilkan Output Dengan Input Serendah-Rendahnya .....	69
	( <i>Spending Well</i> )	
a.	Perencanaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi .....	73
	Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang	
b.	Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi .....	79
	Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang	
3.	Output Yang Dihasilkan Bisa Memenuhi Tujuan Yang .....	82
	Diharapkan ( <i>Spending Wisely</i> )	
a.	Terpenuhinya Semua Kebutuhan Administrasi Perkantoran .....	85
b.	Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Perizinan di .....	89
	DPM-PTSP Kota Palembang	
4.	Pelaporan Keuangan.....	94
a.	Ketaatan Dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	95
b.	Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah .....	101
c.	Laporan Keuangan Diperiksa Oleh Lembaga Keuangan .....	118
d.	Media Pengungkapan Laporan Keuangan.....	122

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran .....	132
1.	Saran Teoritis .....	132
2.	Saran Praktis.....	132

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Program Dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2016	4
2. Realisasi Anggaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016	5
3. Alokasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang	6
4. Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016	7
5. Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017	8
6. Penelitian Terdahulu	29
7. Fokus Penelitian	34
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017	42
9. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	46
10. Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2016	57
11. Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2017	59
12. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Terlibat Dalam Pengelolaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang	68
13. Pengukuran Rasio Efisiensi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2016	70
14. Pengukuran Rasio Efisiensi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2017	71
15. Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam RKPD DPM-PTSP Kota Palembang Periode Pelaksanaan 2017	74
16. Perencanaan Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang	77
17. Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2016	83
18. Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun Anggaran 2017	84
19. Implementasi Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan di Indonesia	105
20. Hasil Audit Laporan Keuangan DPM-PTSP Kota Palembang	120
21. Hasil Analisis dan Intepretasi Data Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Oleh DPM-PTSP Kota Palembang	131

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b> .....	<b>Halaman</b>
1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian .....	17
2. Bagan Kerangka Pemikiran.....	32
3. Stuktur Organisasi DPM-PTSP Kota Palembang .....	54
4. Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa .....	82
5. Sarana dan Prasarana DPM-PTSP Kota Palembang.....	87
6. Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin.....	89
7. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpau (SIPPERI) .....	91
8. Info dan Syarat Pembuatan Izin Pada Sistem Informasi Pelayanan.....	93
Perizinan	
9. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara .....	94
Elektronik	
10. Laporan Realisasi Anggaran DPM-PTSP Kota Palembang.....	98
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
11. Laporan Realisasi Anggaran DPM-PTSP Kota Palembang.....	100
Berdasarkan Permendagri	
12. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA keuangan) .....	105
DPM-PTSP Kota Palembang	
13. Tahapan Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan.....	107
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) .....	110
15. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran .....	111
16. Surat Perintah Membayar (SPM) .....	112
17. Register SP2D .....	113
18. SPJ Belanja Fungsional .....	116
19. Laporan Keuangan DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017 .....	126
20. Halaman Depan Website DPM-PTSP Kota Palembang .....	128
21. Lanjutan Website DPM-PTSP Kota Palembang.....	129

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	140
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	144
3. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I	154
4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II	155
5. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi	156
6. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	159
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	160
8. SK Pembimbing Skripsi	161
9. Surat Perubahan Judul	162
10. Surat Izin Penelitian	163
11. Surat Izin Penelitian Kesbangpol	164
12. Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Kota Palembang	165
13. Pedoman Wawancara	166
14. Pedoman Observasi	169
15. Pedoman Dokumentasi	170
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016	171
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2017	178
18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Fungsional (SPJ Belanja Fungsional) Tahun 2016	185
19. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Fungsional (SPJ Belanja Fungsional) Tahun 2017	192

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKPMMD	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPKP	: Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPM-PTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
GU	: Ganti Uang
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LS	: Langsung
KPPT	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIPPERI	: Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
SKP	: Sasaran Kerja Pegawai
SKPD	: Satuan Perangkat Kerja Daerah Surat Penyediaan Dana
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPD	: Surat Pencairan Dana
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIPISE	: Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
STS	: Surat Tanda Setoran
TU	: Tambah Uang
UP	: Uang Panjar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tugas penting dari pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah merupakan alat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk memperoleh informasi terkait dengan aktivitas atas pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban dari suatu badan hukum atau instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban untuk melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hasil pengelolaan sumberdaya publik. Pemerintah harus menyajikan informasi yang terkait dengan pengelolaan dana publik untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada seluruh kelompok *stakeholders*, sebagai perwujudan transparansi pengelolaan dana publik untuk menciptakan *well-informed society*. Secara sederhana, akuntabilitas anggaran adalah anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sisi proses, pencapaiannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama kelompok sasaran, yaitu masyarakat. Kemudian dari sisi hasil, anggaran akuntabel harus diimplementasikan dengan cara-cara yang transparan dan kompetitif. Akuntabilitas berkaitan dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara atau daerah harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas umum yaitu salah satunya akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang berdasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Kota Palembang, serta mempunyai fungsi di bagian penanaman modal. Melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Pembentukan unit pelayanan terpadu perizinan di Kota Palembang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan perizinan yang terbuka, efisien, tepat waktu dan merata. Oleh sebab itu peran DPM-PTSP Kota Palembang sangat besar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat.



Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, DPM-PTSP Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu DPM-PTSP Kota Palembang mempunyai program pelayanan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan oleh DPM-PTSP Kota Palembang. Visi DPM-PTSP Kota Palembang yaitu “Terdepan Dalam Pelayanan Perizinan dan Investasi”, dengan misinya yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, profesionalisme aparatur, kualitas sarana prasarana dan administrasi
2. Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan peluang investasi strategis
3. Meningkatkan aksesibilitas, fasilitas, dan advokasi pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi

Selanjutnya dari perumusan visi dan misi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program-program yang nyata. Perencanaan strategik merupakan sarana yang menghubungkan antara perumusan strategi oleh organisasi dengan penganggaran, dimana antara tahap perencanaan strategik dengan penganggaran terdapat tahap pembuatan program. Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategik. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkannya sasaran strategik tertentu beserta sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tersebut. Berikut adalah program dan kegiatan yang dijalankan oleh DPM-PTSP Kota Palembang :

**Tabel 1 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2016**

No.	Program	Uraian Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan peralatan rumah tangga
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan manajemen mutu aparatur
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan potensi unggulan daerah
		Penyelenggaraan pameran investasi
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perizinan dan Non Perizinan	Sosialisasi prosedur pembuatan perizinan dan non perizinan
		Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa DPM-PTSP Kota Palembang mempunyai 6 program kerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Kota Palembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat Kota Palembang. Apabila program dan kegiatan tersebut berjalan dengan cukup baik, lancar dan tertib, diharapkan pelayanan investasi dan perizinan terpadu kepada masyarakat akan baik pula. Sesuai dengan komponen

perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kota Palembang tahun 2017-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada DPM-PTSP Kota Palembang adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan. Secara rinci indikator kinerja DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang. Berikut adalah realisasi anggaran program kerja pada DPM-PTSP Kota Palembang tahun anggaran 2016 :

**Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.456.318.571,53	2.274.850.276,00	181.468.295,53	92,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	498.000.000,00	417.896.384,00	80.103.616,00	83,91
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	254.400.000,00	244.065.000,00	10.335.000,00	95,93
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	357.675.000,00	282.808.111,00	74.866.889,00	79,06
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	254.500.000,00	247.060.715,00	7.439.285,00	97,07
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perizinan dan Non Perizinan	237.870.000,00	220.145.000,00	17.725.000,00	92,54
	<b>Jumlah</b>	<b>4.058.763.571,53</b>	<b>3.611.755.896,00</b>	<b>447.007.675,53</b>	<b>88,98</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang memperoleh alokasi anggaran paling besar yaitu sebesar Rp. 2.456.318.571,53 atau sebesar 60,51% dari keseluruhan anggaran program yang ada pada DPM-PTSP Kota Palembang. Program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai 15 kegiatan untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan administrasi perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang. Tujuan pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 1.16.01.01.34.01.5.2 Pemerintahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah untuk lancarnya pelayanan administrasi di DPM-PTSP Kota Palembang. Besarnya anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, akan berpengaruh pada besarnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran tersebut dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan investasi dan perizinan untuk masyarakat di Kota Palembang. Anggaran program pelayanan administrasi perkantoran merupakan anggaran rutin pada DPM-PTSP Kota Palembang yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang. Berikut adalah alokasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016-2017 :

**Tabel 3 Alokasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	2016	2.456.318.571,53	2.274.850.276,00	181.468.295,53	92,61
2	2017	2.052.349.901,00	1.476.069.385,00	352.424.516,00	80,72

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPM-PTSP Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2017 menurun sebesar 16,44% dari anggaran program

pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2016. Anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang bersumber dari APBD Kota Palembang yang digunakan untuk membiayai belanja keperluan administrasi perkantoran selama satu tahun yang harus dikelola dengan optimal sehingga meningkatkan kinerja pelayanan publik DPM-PTSP Kota Palembang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*. Berikut adalah realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran di DPM-PTSP Kota Palembang pada tahun anggaran 2016 :

**Tabel 4 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.680.000,00	0,00	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.924.571,00	89.919.992,00	81,80
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	31.580.000,00	29.654.000,00	93,90
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	76.950.000,00	70.933.410,00	92,18
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.220.000,00	75.954.600,00	89,12
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	34.900.000,00	99,17
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	45.000.000,00	31.589.150,00	70,19
8	Penyediaan alat tulis kantor	230.000.000,00	229.974.215,00	99,98
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	437.502.000,00	431.997.325,00	98,74
10	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8.480.000,00	8.447.500,00	95,55
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	174.140.000,00	167.392.500,00	96,12
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62.590.000,00	59.298.900,00	94,74
13	Penyediaan makanan dan minuman	7.800.000,00	7.735.000,00	99,16
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48.400.000,00	35.285.800,00	72,90
15	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	592.052.000,00	566.310.444,00	95,65
	<b>Jumlah</b>	<b>2.456.318.571,53</b>	<b>2.274.850.276,00</b>	<b>85,28</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2016

Tabel 4 menunjukkan realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Secara persentase realisasi penyerapan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran mencapai 85,28%, pencapaian ini dapat dikategorikan efektif. Berikut adalah realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2017 :

**Tabel 5 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.680.000,00	3.936.000,00	84,10
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	206.454.800,00	132.897.317,00	65,64
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	27.540.000,00	17.700.000,00	68,60
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.950.000,00	9.906.450,00	58,44
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	121.280.005,40	56.220.000,00	65,92
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.720.000,00	19.424.200,00	78,57
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48.000.000,00	31.589.150,00	70,19
8	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	199.969.000,00	99,98
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000,00	190.491.500,00	82,17
10	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	6.703.896,00	6.673.000,00	99,53
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.500.000,000	23.500.000,00	61,84
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000,00	5.805.000,00	74,66
13	Penyediaan makanan dan minuman	94.560.000,00	58.887.350,00	77,24
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	299.670.418,00	58,52
15	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	546.000.000,00	419.400.000,00	72,94
	<b>Jumlah</b>	<b>1.828.493.901,40</b>	<b>1.476.069.385,00</b>	<b>80,72</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) DPM-PTSP Kota Palembang Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4 realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2016 dapat diketahui bahwa terdapat anggaran yang tidak terserap yaitu anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi sebesar 0%, hal tersebut terjadi karena penggunaan anggaran yang ada belum digunakan dengan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing*, dalam hal ini anggaran dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan dari program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi DPM-PTSP Kota Palembang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Kemudian tabel 5 realisasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat anggaran kegiatan yang realisasi anggarannya dapat dikatakan belum efektif karena banyak kegiatan yang penyerapan anggarannya menurun dari tahun 2016 yaitu kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi sebesar 58,44% dan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar 61,84% serta kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi sebesar 58,52%. Anggaran program pelayanan administrasi perkantoran adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran administrasi kantor sehingga anggaran program pelayanan administrasi perkantoran lebih banyak digunakan untuk keperluan kantor dari DPM-PTSP Kota Palembang seperti perlengkapan dan peralatan kantor, penerangan kantor, kebersihan kantor, penyediaan saran dan prasana yang mendukung pelayanan investasi dan pelayanan terpadu serta untuk keperluan honorarium pegawai.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang, karena anggaran program pelayanan administrasi perkantoran yang sangat besar maka besar pula dalam akuntabilitas pengelolaan anggarannya dan bagaimana kaitan penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran dalam meningkatkan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada DPM-PTSP Kota Palembang dalam memaksimalkan pelayanan investasi dan perizinan terpadu yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu: Untuk menjelaskan akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus informasi bagi DPM-PTSP Kota Palembang dan pihak terkait dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi



perkantoran dalam rangka memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

## **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran pada DPM-PTSP Kota Palembang

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: PT Indeks.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara dan Pegawai Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

**Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Dokumen-Dokumen :**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2016 dan 2017

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 dan 2017

**Tulisan Ilmiah yang Dipublikasikan :**

Hussada, Prisa Agiyanti. 2016. *Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih*. Skripsi. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Dwiputri, Resti. 2016. *Akuntabilitas Penggunaan Dana Tugas Belajar PNS Tahun 2014 Di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang*. Skripsi. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Aryzona, Ayu Putrisia. 2017. *Akuntabilitas Dana Program Kemitraan Di PT Semen Baturaja (Persero) Tahun 2014*. Skripsi. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

**Internet :**

Afriyanti, Dwi, dkk. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, (Online), Volume 1, No 1, (jurnal.bpk.go.id, diakses 3 November 2017).

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. *EJournal Administrasi Negara*, (Online), Volume 3, No 1, (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>, diakses 3 November 2017).